



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DENGAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PENGEMBANGAN ILMU ALQUR'AN**  
**PADANG**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAPTIP PASAMAN BARAT**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH**  
**SUMATERA BARAT**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AHLUSSUNNAH BUKITTINGGI**  
**TENTANG**  
**KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**(KKN-PPM) TERPADU**

**Nomor : 120-27/PKS/GSB-2020**

**Nomor : PTAIS.8/ KPW.VI/HM/257/2020**

**Nomor : PTAS.6/KPW/VI/PP/273/2020**

**Nomor : 134.a/A.10/STAI-YASTIS/2020**

**Nomor : STIT-Ahls/KPW.VI/HM/133/2020**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di **Padang** kami yang bertandatangan di bawah ini :

**I. SYAFRIZAL** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat di Jln. Pramuka Nomor 13, Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;



## II. 1. MARTONO

: Ketua Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Pengembangan Agama Islam Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. Dr. H. Abdullah Ahmad No. 2, Sawahan, Padang, Sumatera Barat;

## 2. LUTFIYANI

: Ketua Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Agama Islam YAPTIP Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam YAPTIP Pasaman, yang berkedudukan di Jl. Bundo Kanduang no 142 Simpang Empat, Pasaman Barat, Sumatera Barat;

## 3. NASRIL

: Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. Pramuka IV No.2 Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat.

## 4. ARIF RIDHA

: Ketua Lembaga Pendidikan, dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ahlussunnah Bukittinggi, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ahlussunnah Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Diponegoro no.08 Aur Kuning Bukittinggi.

Selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Sumatera Barat.



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang melakukan koordinasi, pengendalian, dan pertanggungjawaban dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata.

Dengan mengingat ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Nota Kesepakatan Nomor : **856.a/27.010.1/KS/VIII/2020, PTAIS.8/KPW-VI/HM/236/2020, PTAIS.6/KPW/VI/PP/266/2020, 296/AU/STIKES-MCB/VIII/2020, 136/A-10/S-Y/2020, STIT-Ahls/KPW-VI/HM/124/2020** Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama sebagai dasar melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu;
- (2) Tujuan kerjasama untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu di Nagari/Desa/Kelurahan se-Sumatera Barat yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Memberikan pembekalan kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu;
- (2) Menyelenggarakan Program KKN-PPM terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan Nagari/Desa/Kelurahan;
- (3) Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan KKN-PPM Terpadu



### PASAL 3

#### OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek perjanjian kerja sama ini adalah untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu.

### PASAL 4

#### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab :
- a. Mengkoordinir pelaksanaan program/kegiatan KKN-PPM Terpadu;
  - b. Mempersiapkan program dan kegiatan KKN-PPM Terpadu bersama **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menetapkan Lokasi KKN-PPM Terpadu yang akan dijadikan lokasi KKN-PPM Terpadu;
  - d. Menetapkan tema KKN-PPM Terpadu bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
  - e. Memberikan Sosialisasi atau Pembekalan kepada Dosen dan Mahasiswa KKN-PPM Terpadu bersama **PIHAK KEDUA**;
  - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu;
  - g. Melakukan sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada **PIHAK KEDUA**;
  - h. Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Nagari/Desa dan *Stakeholder* lainnya dalam Program KKN-PPM Terpadu;
  - i. Melakukan Evaluasi Program bersama **PIHAK KEDUA**;
  - j. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada **PIHAK KEDUA**;
  - k. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan KKN-PPM Terpadu;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan KKN-PPM Terpadu bersama **PIHAK KESATU**;
  - b. Mempersiapkan program dan kegiatan KKN-PPM Terpadu bersama **PIHAK KESATU**;
  - c. Menetapkan tema KKN-PPM Terpadu bersama dengan **PIHAK KESATU**;
  - d. Menempatkan Mahasiswa pada lokasi KKN-PPM Terpadu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
  - e. Melakukan Pemetaan Potensi dan permasalahan
  - f. Melaksanakan program kerja KKN-PPM Terpadu
  - g. Menyusun dan Presentase laporan KKN
  - h. Melakukan terminasi (pemulangan mahasiswa)



- i. Mengikuti pertemuan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** tentang persiapan dan pelaksanaan KKN-PPM Terpadu;
- j. Memberikan Sosialisasi dan Pembekalan kepada Dosen dan Mahasiswa KKN-PPM Terpadu;
- k. Melakukan Evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM Terpadu kepada **PIHAK KESATU**;
- l. Mendukung Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- m. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan KKN-PPM Terpadu

## **PASAL 5**

### **HAK PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** memiliki hak untuk :

- a. Menerima laporan tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima data Mahasiswa dan pelaksana Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima data-data implementasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu dari **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk :

- a. Menerima Data Lokasi Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dari **PIHAK KESATU**;
- c. Keluar dari Perjanjian Kerjasama

## **PASAL 6**

### **KOORDINASI**

**PIHAK KESATU** melakukan pertemuan dengan **PIHAK KEDUA** secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Program

## **PASAL 7**

### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.



## **PASAL 8**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **PASAL 9**

### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 12**

### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.



## **PASAL 12**

### **ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 13**

### **SURAT-MENYURAT**

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** masing-masing sebagai berikut :

#### **a. PIHAK KESATU**

Nama : Syafrizal  
Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Pramuka Nomor 13 Padang, Sumatera Barat  
No Telp/Fax : (0751) 442273

#### **b. PIHAK KEDUA**

1. Nama : Martono  
Instansi : Sekolah Tinggi Pengembangan Agama Islam Ilmu Al-Quran Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Dr. H. Abdullah Ahmad No. 2, Sawahan, Padang, Sumatera Barat  
No Telp/Fax : (0751) 27311
2. Nama : Lutfiyani  
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam YAPTIP Pasaman Barat  
Alamat : Jl. BundoKanduang no 142 Simpang Empat, Pasaman Barat, Sumatera Barat  
No Telp/Fax : 082225828126
3. Nama : Nasril  
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Pramuka IV No.2 Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat  
No Telp/Fax : (0751) 7054551



4. Nama : Arif Ridha  
Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ahlussunnah  
Bukittinggi  
Alamat : Jl. Diponegoro no.08 Aur Kuning Bukittinggi  
No Telp/Fax : (0752) 34130

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**PIHAK KEDUA**

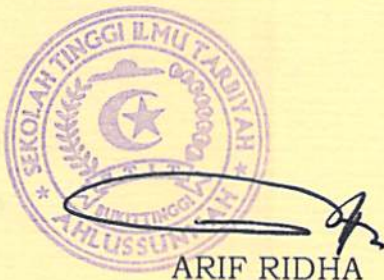
KETUA PENGELOLA KKN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM YAPTIP PASAMAN  
BARAT



KETUA PENGELOLA KKN SEKOLAH  
TINGGI PENGEMBANGAN AGAMA  
ISLAM ILMU AL-QURAN PADANG



KETUA LP2M SEKOLAH TINGGI ILMU  
TARBIYAH AHLUSSUNNAH BUKITTINGGI



PENANGGUNG JAWAB KKN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN  
TARBIYAH ISLAMIYAH  
SUMATERA BARAT





4. Nama : Arif Ridha  
Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ahlussunnah  
Bukittinggi  
Alamat : Jl. Diponegoro no.08 Aur Kuning Bukittinggi  
No Telp/Fax : (0752) 34130

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SUMATERA BARAT



SYAERIZAL

**PIHAK KEDUA**

KETUA PENGELOLA KKN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM YAPTIP PASAMAN  
BARAT



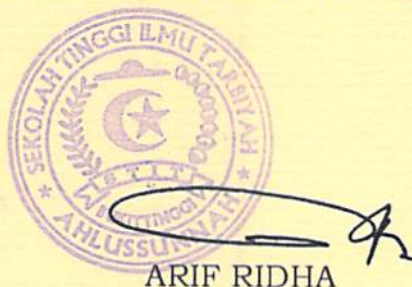
LUTFIYANI

KETUA PENGELOLA KKN SEKOLAH  
TINGGI PENGEMBANGAN AGAMA  
ISLAM ILMU AL-QURAN PADANG



MARTONO

KETUA LP2M SEKOLAH TINGGI ILMU  
TARBIYAH AHLUSSUNNAH BUKITTINGGI



ARIF RIDHA

PENANGGUNG JAWAB KKN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN  
TARBIYAH ISLAMİYAH  
SUMATERA BARAT



NASRIL





4. Nama : Arif Ridha  
Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ahlussunnah  
Bukittinggi  
Alamat : Jl. Diponegoro no.08 Aur Kuning Bukittinggi  
No Telp/Fax : (0752) 34130

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SUMATERA BARAT



  
SYAFRIZAL

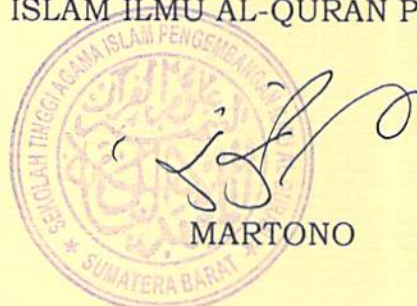
**PIHAK KEDUA**


KETUA PENGELOLA KKN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM YAPTIP PASAMAN  
BARAT



  
LUTFIYANI

KETUA PENGELOLA KKN SEKOLAH  
TINGGI PENGEMBANGAN AGAMA  
ISLAM ILMU AL-QURAN PADANG



  
MARTONO

KETUA LP2M SEKOLAH TINGGI ILMU  
TARBIYAH AHLUSSUNNAH BUKITTINGGI



  
ARIF RIDHA

PENANGGUNG JAWAB KKN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN  
TARBIYAH ISLAMIAH  
SUMATERA BARAT



  
NASRIL



4. Nama : Arif Ridha  
Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ahlussunnah  
Bukittinggi  
Alamat : Jl. Diponegoro no.08 Aur Kuning Bukittinggi  
No Telp/Fax : (0752) 34130

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SUMATERA BARAT



SYAFRIZAL

**PIHAK KEDUA**

KETUA PENGELOLA KKN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM YAPTIP PASAMAN  
BARAT



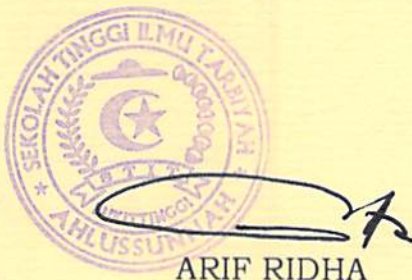
LUTFIYANI

KETUA PENGELOLA KKN SEKOLAH  
TINGGI PENGEMBANGAN AGAMA  
ISLAM ILMU AL-QURAN PADANG



MARTONO

KETUA LP2M SEKOLAH TINGGI ILMU  
TARBIYAH AHLUSSUNNAH BUKITTINGGI



ARIF RIDHA

PENANGGUNG JAWAB KKN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN  
TARBIYAH ISLAMIAH  
SUMATERA BARAT



NASRIL

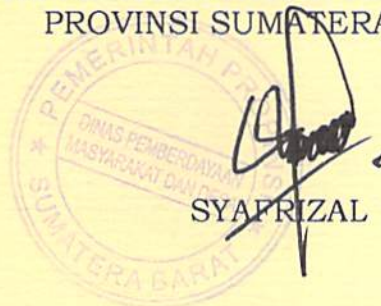


4. Nama : Arif Ridha  
Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ahlussunnah  
Bukittinggi  
Alamat : Jl. Diponegoro no.08 Aur Kuning Bukittinggi  
No Telp/Fax : (0752) 34130

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SUMATERA BARAT



SYAFRIZAL

**PIHAK KEDUA**

KETUA PENGELOLA KKN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM YAPTIP PASAMAN  
BARAT



LUTFIYANI

KETUA PENGELOLA KKN SEKOLAH  
TINGGI PENGEMBANGAN AGAMA  
ISLAM ILMU AL-QURAN PADANG



MARTONO

KETUA LP2M SEKOLAH TINGGI ILMU  
TARBIYAH AHLUSSUNNAH BUKITTINGGI



ARIF RIDHA

PENANGGUNG JAWAB KKN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN  
TARBIYAH ISLAMIAH  
SUMATERA BARAT



NASRIL